

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PERKARA
LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum Guna memenuhi salah satu syarat
untuk Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Priwan Sihaloho

09.20.0051

FAKULTAS HUKUM dan KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM

PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI

JAWA TENGAH

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

Nama : Priwan Sihalo

NIM : 09.20.0051

Semarang, 8 Desember 2014

Dosen Pembimbing Skripsi :

(YOVITA INDRAYATI, S.H., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2014

PERNYATAAN

Saya menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul **Penerapan Sanksi Administratif Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi atau karya tulis apapun, kecuali yang dijadikan acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila sebagian atau seluruh skripsi ini terbukti plagiat, saya menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 9 Desember 2014

Priwan Sihalo
(09.20.0051)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

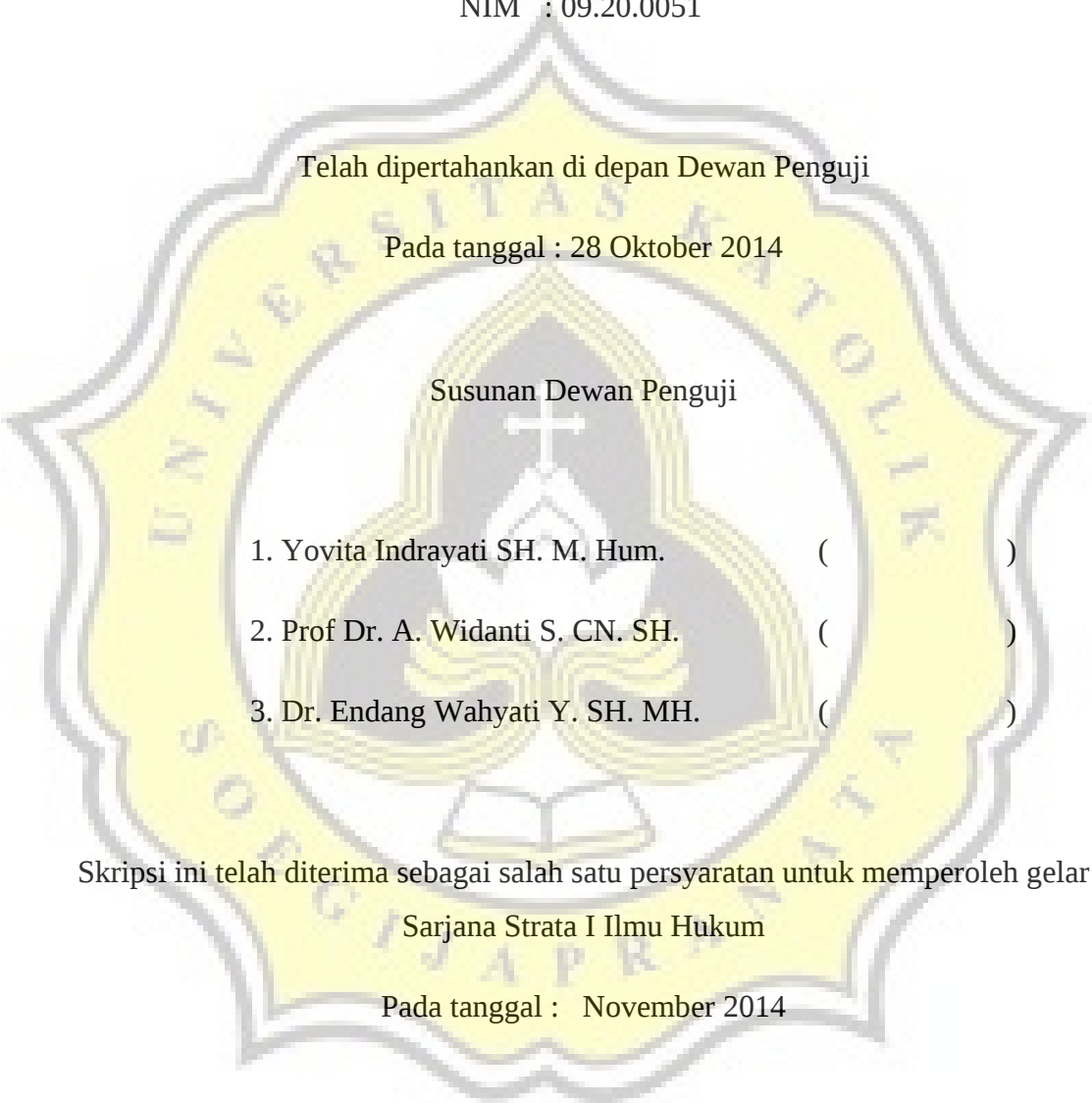
Nama : Priwan Sihaloho

NIM : 09.20.0051

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 28 Oktober 2014

Susunan Dewan Penguji

- 
1. Yovita Indrayati SH. M. Hum. ()
 2. Prof Dr. A. Widanti S. CN. SH. ()
 3. Dr. Endang Wahyati Y. SH. MH. ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : November 2014

B. Danang Setianto S.H., L.L.M.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Alai jolma parbagas na buni, na tong-tong martondi na lambok
jala na dame, i do na arga dietong Debata”***

(1 Petrus 3:4)

***“Laki-Laki sejati; lembut kepada orang tua, anggun kepada wanita,
bergembira bersama anak-anak, dan bekerja sehebat cita-citanya”***

(Mario Teguh)

***“Terkadang, berhenti dan menyerah, kelihatan sebagai pilihan
yang terbaik. Tapi aku diciptakan tidak untuk kalah, aku harus
bangkit lagi. Bukan jatuhku yang penting, tapi bangkitku”***

(Mario Teguh)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua Penulis
2. Isteri dan Putri Penulis
3. Seluruh Keluarga penulis
4. Teman-teman penulis
5. Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan perlindungan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan judul Penerapan Sanksi Administrasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penulisan ini, penulis ingin menggambarkan mengenai Peraturan daerah yang mengatur kewenangan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, Penerapan sanksi administratif serta hambatan dan solusi yang dilakukan BLH Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan sanksi administratif.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa pikiran, waktu, tenaga, materi, sehingga dalam penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.sc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Bapak B. Danang Setianto, SH., L.L.M selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum selaku Dosen Wali.
4. Ibu Yovita Indrayati S. H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing Penulis dalam proses penyusunan Skripsi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu Dosen dan jajaran Staf Tata Usaha beserta karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Kedua Orang tua Penulis, Bapak Biliher Sihaloho dan Ibu Tumiar Sidabalok
7. Seorang istri yang setia menyemangati penulis, Gloria Mazmuria Batuara Amd., Keb.
8. Wanita cantik nan manis yang penulis sayangi Renata Christabel Roida Sihaloho
9. Semua saudara/i penulis yang dengan setiap mengingatkan dan mendukung saya.
10. Keponakan-keponakan penulis yang menghibur disaat suntuk.
11. Bapak Sisbambang Aji selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
12. Dr. Rakhmat Bowo Suharto S.H., M.H Dosen Hukum Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
13. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi yang menjadi teman seperjuangan

14. Teman-Teman Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberi masukan
15. Teman-Teman Rombongan Mahasiswa Batak (ROMBAK) Semarang yang memberikan inspirasi di saat tidak ada ide.
16. Teman-Teman Kost yang setia menemani saya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Skripsi ini, namun demikian bukan berarti Skripsi ini telah dikatakan sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya dan faktor-faktor lainnya. Oleh Karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap bahwa Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca maupun pihak lain yang memerlukannya.

Semarang, 9 Desember 2014

Penulis

Priwan Sihaloho

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Surat Pernyataan	iii
Pengesahan	iv
Abstrak	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Isi	xii

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Teknik Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Obyek Penelitian	13
4. Subjek Penelitian	14
5. Lokasi Penelitian	14
6. Teknik Pengumpulan Data	14

7. Metode Penyajian Data dan analisa Data	18
F. Sistematika Penulisan	18

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hukum Dan Lingkungan Hidup	20
1. Pengertian Hukum	20
2. Pengertian Lingkungan Hidup	21
3. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup	22
B. Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia	23
C. Pemerintah dan Pemerintahan	27
1. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)	28
2. Pemerintahan Daerah	32
D. Kewenangan	36
1. Tinjauan Umum tentang kewenangan	36
a. Atribusi	37
b. Delegasi	38
c. Mandat	40
2. Sifat wewenang pemerintah	40
3. Isi wewenang pemerintah	41
E. Pengawasan Preventif dan Represif	42
1. Pengawasan Preventif	42
2. Pengawasan Represif	42
F. Penegakkan hukum dan sanksi administratif	42
1. Penegakkan hukum lingkungan di Indonesia	42

a. Penegakkan Hukum administrasi	42
b. Penegakkan Hukum Perdata	43
c. Penegakkan Hukum pidana	43
2. Penegakkan sanksi administratif	44

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Umum Mengenai Provinsi Jawa Tengah	47
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	52

B. Pembahasan

1. pengaturan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi administratif berdasarkan produk hukum daerah	54
2. Pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup daerah provinsi jawa tengah.....	60
3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah provinsi jawa tengah dalam penerapan sanksi administratif dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut.....	73

PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Provinsi Jawa Tengah	48
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pelaksanaan Sanksi Administratif.....	63
---	----



ABSTRAK

Gubernur memberikan izin lingkungan kepada setiap pelaku usaha/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun setelah mendapatkan izin tersebut pada perjalanannya ada pelaku yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan hidup, meskipun sudah ada yang diberikan sanksi. Sehingga perlu diteliti dengan judul Penerapan sanksi administratif oleh Pemerintah daerah provinsi Jawa tengah dalam Penanganan perkara lingkungan hidup di provinsi Jawa tengah dengan perumusan masalah 1). Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi administratif pola penanganan perkara lingkungan hidup? 2). Bagaimanakah penerapan sanksi administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada perkara lingkungan hidup? 3). Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi administratif pada penanganan perkara lingkungan hidup dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Dengan didukung data primer dan sekunder serta menganalisis dengan teori hukum, asas hukum dan peraturan yang terkait pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pengaturan kewenangan, pelaksanaan penerapan sanksi administratif serta hambatan dan solusi yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/16/2008 tanggal 28 Juli tentang Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Dalam penerapannya kewenangan yang telah didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala BLH Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur karena pada penerapannya kewenangan yang didelegasikan bercampur dengan kewenangan mandat. Pada penerapannya BLH mendapatkan hambatan seperti anggaran yang terbatas, jumlah PPLHD yang tidak sesuai dengan jumlah usaha/kegiatan yang harus diawasi meskipun demikian BLH tetap bekerja secara maksimal dalam penjatuhan sanksi administratif

Kata kunci : Kewenangan, Penerapan, Sanksi Administratif